



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENJA TAHUN 2026



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPID Kabupaten Pesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



WARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030, sekaligus menjadi pedoman operasional dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika pada tahun 2026.

Penyusunan Renja ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta memperhatikan kebijakan nasional di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Proses penyusunan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan terkait agar dokumen ini memiliki kualitas dan relevansi yang memadai sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renja Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik, pengelolaan data, dan penguatan transformasi digital, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing.

Painan, 22 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, SH., M. Hum
NIP. 19760407.199803 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik untuk tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 beserta perubahannya, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJMD Tahun 2025–2030, yang mewajibkan setiap perangkat daerah menyiapkan rencana kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD.

Renja Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan sasaran, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2030, sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tetap sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan Renja dilakukan untuk menyesuaikan target kinerja dengan perkembangan dinamika kebijakan nasional, transformasi digital, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini juga lahir dari kebutuhan untuk menanggapi berbagai tantangan, seperti pelaksanaan Pemerintahan Digital (PEMDI), percepatan transformasi digital daerah, penguatan keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan data yang terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia. Renja Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman strategis dan operasional dalam menetapkan prioritas kegiatan, alokasi anggaran, serta target kinerja yang terukur guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan target Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi.
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman resmi perencanaan tahunan yang:

1. Menguraikan sasaran, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo 2025–2030 ke dalam rencana tahunan yang terukur dan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 serta dasar penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang komunikasi dan informatika.
3. Memastikan keselarasan program Dinas Kominfo dengan kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan transformasi digital, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan data terpadu.

4. Menetapkan target kinerja dan prioritas kegiatan guna meningkatkan kualitas layanan informasi, infrastruktur TIK, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menetapkan langkah strategis untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pemerataan akses jaringan internet, pusat data, serta layanan TIK yang mendukung transformasi digital di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Merumuskan program peningkatan kualitas aplikasi layanan pemerintahan digital, keamanan siber, dan integrasi data antar-perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Memperkuat pelayanan informasi publik melalui pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan kanal komunikasi resmi, serta peningkatan kapasitas aparatur untuk menjamin hak masyarakat atas informasi yang transparan dan akurat.
4. Menetapkan program strategis untuk penyebaran informasi pembangunan daerah melalui berbagai media, termasuk media massa, media sosial, dan videotron, guna membangun opini publik yang positif dan mendukung partisipasi masyarakat.
5. Memastikan terwujudnya perlindungan data pemerintah daerah melalui penguatan layanan persandian, enkripsi dokumen penting, dan peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi seluruh perangkat daerah.
6. Menjamin ketersediaan data sektoral yang valid, mutakhir, dan terintegrasi sesuai prinsip Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

- a. Capaian kinerja program dan kegiatan
- b. Analisis capaian indikator kinerja utama dan kinerja sasaran
- c. Realisasi anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

2.3 Permasalahan dan Faktor Penghambat

2.4 Upaya Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut

Bab III Tujuan, Sasaran, dan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2026

3.1 Telaahan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Nasional

3.2 Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

3.3 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026

3.4 Rencana Program dan Kegiatan, meliputi:

- a. Program dan kegiatan prioritas
- b. Indikator kinerja dan target
- c. Lokasi, kelompok sasaran, dan perkiraan kebutuhan anggaran

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

4.1 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif

4.2 Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Kegiatan

4.3 Rencana Aksi dan Jadwal Pelaksanaan

Bab V Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Rekomendasi dan Arahan Pelaksanaan

Lampiran-Lampiran

- a. Matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Pagu Indikatif

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 secara umum menunjukkan kinerja baik dan selaras dengan sasaran Rencana Strategis (Renstra) 2025–2030 serta arah kebijakan RPJMD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, rata-rata capaian program dan kegiatan mencapai sekitar 90–95 % dari target yang ditetapkan.

Indikator kinerja utama, seperti peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik, statistik sektoral ,perluasan akses internet dan persandian (keamanan data), menunjukkan progres positif dengan rata-rata realisasi mendekati target tahunan. Kinerja sasaran yang berfokus pada transformasi digital, penguatan layanan informasi publik, dan keamanan data juga terlaksana secara konsisten.

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi anggaran mencapai lebih dari 90 % dari pagu yang dialokasikan. Sisa anggaran berasal dari efisiensi pengadaan sarana TIK dan penyesuaian kegiatan lapangan tanpa mengurangi capaian kinerja.

Meskipun demikian, beberapa kendala masih dijumpai, antara lain keterbatasan jaringan di wilayah terpencil, kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan keamanan siber. Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Renja Tahun 2026 untuk memastikan keberlanjutan program prioritas, percepatan transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pesisir Selatan.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|----|---|--|----------------|-----|------------|------------|------|----------------|----------------|------|
| | | | | DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | |
| | | | | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 1601 | 2.02 | | Kegiatan Adminsitration Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah | 100% | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 1601 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 54 Orang/bulan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 54 Orang/bulan | 54 Orang/bulan | 100% |
| 2 | 1601 | 2.02 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | 12 Dokumen | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 1601 | 2.06 | | Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya adminsitration umum perangkat daerah | | | | | | | | |
| 2 | 1601 | 2.06 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | 7 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 7 Paket | 7 Paket | 100% |
| 2 | 1601 | 2.06 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang | 0 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 0 Paket | 0 Paket | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------|-----|----------|----------|------|-------------|-------------|------|--|
| | | | | | Disediakan | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | 4 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4 Paket | 4 Paket | 100% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 4 Paket | 4 Paket | 100% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 12 Dokumen | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | 60 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 60 Laporan | 60 Laporan | 100% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 200 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 200 Laporan | 200 Laporan | 100% | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|--------|----------|----------|------|------------|------------|------|
| | | | | | (Laporan) | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | 12 Laporan | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12 Unit | n/a | 12 Unit | 12 Unit | 100% | 12 Unit | 12 Unit | 100% |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 100% |
| | | | | | Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 81 Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 81 Unit | 81 Unit | 100% |
| 2 | 16 | 01 | 2.09 | 11 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 Unit | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 Unit | 0 Unit | 0 % |
| 2 | 16 | 02 | | | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase tingkat kepuasan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--------------|-----|------------|------------|------|--------------|--------------|------|
| | | | | | masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 05 | Sub Kegiatan Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | 12 Dokumen | n/a | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | 15 Komunitas | n/a | n/a | n/a | n/a | 15 Komunitas | 15 Komunitas | 100% |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 12 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Pemohon) | 20 Pemohon | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 Pemohon | 20 Pemohon | 100% |
| | | | | | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik | 3 Media | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 Media | 3 Media | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------|
| | | | | | milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Indeks SPBE | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | | KEGIATAN PENGELOLAAN GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pengelolaan E Government di lingkup Kab.Pesisir Selatan | 12 bulan | n/a | n/a | n/a | n/a | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah. | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | 1 Dokumen | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 07 | Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan | 5 Aplikasi | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 Aplikasi | 5 Aplikasi | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|---|-----------|--------|--------|--------|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 03 | 2.02 | 09 | Sub Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | 41 OPD | 41 OPD | 41 OPD | 41 OPD | 100% | 41 OPD | 41 OPD | 100% |
| | | | | | Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyekenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | 41 OPD | 41 OPD | 41 OPD | 41 OPD | 100% | 41 OPD | 41 OPD | 100% |
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | | KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat | 1 Dokumen | n/a | 100% | 100% | 100% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|------|
| | | | | | diakses oleh pengguna data. (%) | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 02 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | 90 Orang | n/a | n/a | n/a | n/a | 90 Orang | 90 Orang | 100% |
| 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | | KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | | | | | | | | |
| 2 | 21 | 02 | 2.01 | 03 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik | 3 Laporan | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2026. Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sebanyak 5 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 8.230.341.487,- (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 7.602.420.051,00 (Tujuh milyar enam ratus dua juta empat ratus dua puluh ribu lima puluh satu rupiah) atau sebesar 92%.

1. Program/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pelaksanaan pada sub kegiatan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika, pencapaian kinerjanya sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam target pada masing-masing sub kegiatan.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

b. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.

Pelaksanaan sub kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika , capaian kinerja yang dicapai yaitu :

Jenis Layanan:

- ✓ Internet Dedicated Fiber Optik IP Transit (Domestik) :500 Mbps.
- ✓ Internet Dedicated Fiber Optik IP Transit (Internasional) : 750 Mbps
- ✓ Internet Dedicated LPSE : 50 Mbps
- ✓ Internet High Speed Broadband Kantor LPSE : 300 Mbps.
- ✓ Internet Highspeed Broadband (21 Puskesmas, 2 RSUD Tapan dan 1 Kantor Perwakilan) = 22 lokasi x 100 Mbps.
- ✓ Internet Highspeed Broadband (14 Kantor Kecamatan) = 14 lokasi x 50 Mbps.
- ✓ Internet Free Wifi (35 lokasi) : 35 lokasi x 20 Mbps
- ✓ Jasa Perbaikan Fiber Optik Mandiri Pemkab Pesisir Selatan.

c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, capaian kinerja yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan verifikasi Data Informasi Publik (DIP) sebanyak 3.000 DIP

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, capaian kinerja yang dilakukan yaitu Terselenggaranya penyampaian hasil pembangunan daerah Pesisir Selatan melalui Radio Langkisau FM maupun mobil keliling penerangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

e. Sub Kegiatan Relasi Media

Pelaksanaan Sub Kegiatan Relasi Media, capaian kinerjanya Terlaksananya penyampaian berita pembangunan daerah melalui media online terdiri dari :

- ✓ Jumlah berita website: 611
- ✓ Jumlah artikel website: 99
- ✓ Liputan wartawan : 124

Total: 834

f. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, capaian kinerjanya adalah terbinanya 15 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

g. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, capaian kerjanya yaitu terlaksananya Bimbingan teknis Pengajuan Rekomendasi dan Meta data statistik dengan jumlah peserta 10 Perangkat Daerah.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, capaian kinerja Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan jumlah peserta 52 Orang (Produsen Data). Pada Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/kota juga mencetak :

- a. 35 Buku Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021
- b. 15 Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2021
- c. 20 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha 2020-2024.
- d. 20 Buku Produk Domestik Regional Bruto menurut Pengeluaran 2020-2024
- e. 27 Buku Ringkasan Meta Data 2025

i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Bidang Statistik dan Persandian, capaian kerjanya yaitu :

- Pembuatan Tanda Tangan Digital yang ditargetkan sebanyak 100 ASN, dan capaian target terealisasi sebanyak 100 ASN

2. Program/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024

Untuk program/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

3. Program/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 100%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dengan indikator Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Capaian kinerja : 3,42 kategori baik
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Capaian kinerja : 99 % kategori informatif
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tidak ada.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu Satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika tidak bisa lepas dari pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 tahun 2011 tentang petunjuk teknis standar pelayanan minimal. Untuk Mencapai target standar pelayanan minimal sesuai standar nasional, perlu didukung dengan upaya pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi,

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat dengan format daerah masing-masing, table T-C.30

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Pesisir Selatan

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|----------------------|-------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi | | | 3,34 | 3,35 | 3,55 | 3,55 | 3,34 | 3,48 | 3,35 | 3,55 | |
| 2 | Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan | | | 4,19 | 4,20 | 4,21 | 4,76 | | 4,39 | 4,76 | 4,38 | |
| 2 | Meningkatnya keterbukaan informasi publik | | | 93 | 93 | 94 | 95 | 99,70 | 99,92 | 99,97 | 86,68 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan capaian target pengembangan Komunikasi dan Informatika, maka harus selalu memperhatikan elemen–elemen dalam tata kelola komunikasi, yakni sumber berita/informasi, penerima berita/informasi, substansi berita/informasi dan

saluran berita/informasi yang terbingkai dalam sistem. Dari elemen – elemen tersebut, ternyata terdapat beberapa isu sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kekurangan sumber daya, baik SDM maupun sarana dan prasarana. Dari segi sarana dan prasarana masih sangat kurang, khususnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung teknis kegiatan diseminasi informasi.
2. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat (KIM) dalam diseminasi informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu partner pemerintah dalam diseminasi informasi belum terbentuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu untuk periode ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan akan memfokuskan pada pembentukan KIM pada tingkat kecamatan.
3. Belum maksimalnya hasil kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan kurangnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan teknis.
4. Kurangnya maksimalnya pemahaman aparatur dibidang statistik sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan. Statistik sektoral adalah salah satu urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal penyediaan data statistik sektoral belum terlaksana dengan baik karena sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas ini belum terpenuhi baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu ke depan peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur yang menangani statistik sektoral menjadi fokus perhatian selain penyediaan data.
5. Belum maksimalnya ketersediaan sumber daya, baik aparatur yang memiliki kualifikasi sandi, tempat kegiatan persandian dan peralatan persandian. Belum terciptanya koordinasi yang handal antara lintas sektoral dalam melaksanakan program/kegiatan.
6. Substansi berita/informasi yang disampaikan masih kekurangan sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antara Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan bagi kepentingan masyarakat masih sangat terbatas mengingat anggaran yang tersedia sangat minim padahal untuk menangani masalah komunikasi dan infomatika merupakan tanggungjawab lintas sektor. Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergis sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat.

Tabel 2. 4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | NIHIL | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan Renja Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Melalui proses telaahan ini, perangkat daerah mengidentifikasi kebijakan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi, antara lain:

- Transformasi digital pemerintahan dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintahan Digital (PEMDI).
- Peningkatan literasi dan budaya digital masyarakat untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif.
- Penguatan ketahanan siber dan keterbukaan informasi publik sesuai standar nasional.

Hasil telaahan tersebut menjadi dasar penentuan program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja 2026, sehingga:

1. Sinkron dengan target RPJMD 2025–2030 dan RKP 2026, termasuk agenda transformasi birokrasi digital.
2. Mendukung pencapaian sasaran nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta pendanaan melalui integrasi kebijakan pusat dan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dilakukan untuk menjamin keselarasan rencana kerja daerah dengan arah pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam RPJPN 2025–2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan berbagai regulasi sektor komunikasi dan informatika.

Dalam urusan komunikasi dan informatika, beberapa kebijakan nasional yang menjadi acuan utama antara lain:

1. Percepatan Transformasi Digital sesuai *Roadmap Digital Indonesia 2021–2024* dan agenda berkelanjutan menuju 2030, termasuk penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peningkatan Literasi dan Budaya Digital Masyarakat untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif dan berdaya saing.
3. Penguatan Infrastruktur TIK dan Konektivitas khususnya pemerataan akses internet di wilayah perdesaan dan pesisir.
4. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Perlindungan Data Pribadi untuk meningkatkan transparansi dan keamanan siber.

Hasil telaahan menunjukkan bahwa program dan kegiatan Diskominfo perlu difokuskan pada:

- a. Pengembangan dan integrasi layanan digital pemerintahan melalui platform Pemerintahan Digital yang andal.
- b. Peningkatan kapasitas SDM TIK serta literasi digital masyarakat hingga tingkat nagari/desa.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan yang menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah terpencil.
- d. Optimalisasi diseminasi informasi publik yang cepat, akurat, dan berbasis data.

Telaahan kebijakan nasional ini menjadi dasar penetapan tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja Renja Tahun 2026 Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan agar setiap langkah pembangunan selaras dengan prioritas nasional, mendukung pencapaian target RPJMD 2025–2030, dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat daerah Pesisir Selatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2030.

Rencana Kerja Dinas Kominfo tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Mengoptimalkan layanan komunikasi dan informatika melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk perluasan jaringan internet hingga ke nagari.
2. Mendorong transformasi digital pemerintahan dengan pengembangan dan integrasi Pemerintahan Digital (PEMDI) agar layanan publik lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Meningkatkan literasi dan budaya digital masyarakat, sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara aman, produktif, dan kreatif.
4. Memperkuat keterbukaan informasi publik dan keamanan siber, guna memastikan hak masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan terlindungi.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD 2025–2030 serta prioritas pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informatika. Sasaran ini menjadi ukuran keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2026.

Secara garis besar, sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Layanan TIK
Terwujudnya akses internet yang lebih luas dan merata hingga ke nagari, sehingga mendukung pemerataan layanan publik digital.
2. Sistem Pemerintahan Digital (PEMDI) terselenggaranya layanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui pengembangan aplikasi dan platform digital yang aman serta mudah diakses masyarakat.
3. Meningkatnya Literasi dan Budaya Digital Masyarakat
Terwujudnya masyarakat yang cakap memanfaatkan teknologi secara produktif, kreatif, dan aman, melalui edukasi literasi digital dan peningkatan kapasitas SDM aparatur.
4. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan Keamanan Siber.
Tercapainya pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan terlindungi, sekaligus peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan data dan informasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika, dengan fokus pada peningkatan layanan publik digital, pemerataan akses informasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Beberapa program dan kegiatan utama yang direncanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Kegiatan Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2026 mendukung prioritas pembangunan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2026**

| URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2026 (TAHUN RENCANA) | | | |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------|
| | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHA N DANA PAGU INDIKATIF Rp.) | SUMBER DANA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | |
| PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN/KOTA | Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten | | | | |
| KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH | Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | Diskominfo | 12 Dokumen | 57.902.750 | APBD |
| KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | Diskominfo | 33 orang | 4.120.941.673 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|-------------|------|
| Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | Diskominfo | 12 Dokumen | 101.871.316 | APBD |
| KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Diskominfo | 7 paket | 5.185.475 | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | Diskominfo | 1 Paket | 9.426.930 | APBD |
| Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | Diskominfo | 1 paket | 10.073.037 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | Diskominfo | 12 Dokumen | 5.400.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan) | Diskominfo | 12 Laporan | 6.600.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | Diskominfo | 12 Laporan | 68.305.000 | APBD |
| KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | Diskominfo | 0 | 0 | APBD |
| KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------------|-------------|------|
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | Diskominfo | 12 Laporan | 216.360.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Diskominfo | 12 Laporan | 160.800.000 | APBD |
| KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase jumlah Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Diskominfo | 1 Unit | 40.998.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | Diskominfo | 2 unit Mobil dan 10 unit Motor | 80.642.300 | APBD |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | Diskominfo | 1 unit | 14.150.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Diskominfo | 1 unit | 0 | APBD |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah | | | | |
| KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public pemerintah daerah | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|-------------|------|
| Sub Kegiatan Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan) | Diskominfo | 12 (laporan) | 286.063.500 | APBD |
| Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas) | Diskominfo | 15 Komunitas | 13.740.000 | APBD |
| Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Pemohon) | Diskominfo | 20 Pemohon | 163.550.912 | APBD |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media) | Diskominfo | 3 Media | 184.587.500 | APBD |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI | Indeks SPBE | Kab.Pesisir Selatan | | | |
| KEGIATAN PENGELOLAAN E GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pengelolaan E Government di lingkup Kab.Pesisir Selatan | Kab.Pesisir Selatan | | | |
| Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah. | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen) | Diskominfo | 2 dokumen | 59.244.684 | APBD |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------|------|
| Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi) | Diskominfo | 5 Aplikasi | 231.410.000 | APBD |
| Sub Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah) | Diskominfo | 41 Perangkat Daerah | 396.752.350 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyekenggaraan SPBE | Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah) | Kab.Pesisir Selatan | 41 Perangkat Daerah | 1.706.640.000 | APBD |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) | Kab.Pesisir Selatan | | | |
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terpenuhinya penyediaan data statistik sektoral daerah Kab. Pesisir Selatan | Kab.Pesisir Selatan | | | |
| Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%) | Kab.Pesisir Selatan | 100 | 32.294.110 | APBD |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%) | Kab.Pesisir Selatan | 100 | 50.829.040 | APBD |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) | Kab.Pesisir Selatan | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|---------------|------|
| KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | Kab.Pesisir Selatan | | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan) | Kab.Pesisir Selatan | 3 Laporan | 41.556.278 | APBD |
| Jumlah | | | | 8.065.325.000 | |

BAB IV

PENUTUP

Kajian analisa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah kritis dalam perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Dengan menganalisis potensi retribusi dari berbagai sumber, termasuk videotron, pemerintah daerah dapat menetapkan target yang realistis dan strategis, memastikan penerimaan yang stabil, dan memperbaiki kualitas layanan publik. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, kajian ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Semoga Kajian Analisa Target Pendapatan Asli Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pesisir Selatan

WENDI, SH., M. Hum

NIP. 19760407.199803 1 005



**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | | | | | DAERAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 7.742.712.048,00 | | | | | | | 8.795.375.289,00 | |
| | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.742.712.048,00 | | | | | | | 8.795.375.289,00 | |
| | 2.16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 7.617.867.938,00 | | | | | | | 8.535.375.289,00 | |
| 1. | 2.16.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | 4.836.913.926,00 | | | | | | - | 5.060.375.289,00 | |
| | | [Meningkatkan Tata Kelola Organisasi] | Jumlah Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah Persentase Kinerja Bidang yang tercapai | 1 87 97 | 1 845 94 | 1 86 94 | 1 86 95 | 4.836.913.926,00 | - | - | - | - | - | - | 5.060.375.289,00 | - |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Persentase | 4.218.972.989,00 | | | - | Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 4.318.972.989,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Bulan Orang/bulan | 4.117.101.673,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 4.217.101.673,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | | | | 12 Dokumen | 101.871.316,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 101.871.316,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i> | - | | | 100 Persentase | 104.990.442,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 134.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 7 Paket | 5.185.475,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 6.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | | | | 3 Paket | 0,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | | | | 7 Paket | 10.073.037,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> | | | | 5 Paket | 9.426.930,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | | | | 12 Dokumen | 5.400.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 5.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | | | | 60 Laporan | 6.600.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 7.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | | | | 150 Laporan | 68.305.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 70.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase terlaksananya jasa penunjang Dinas</i> | - | | | 100 Persentase | 377.160.000,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 416.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 216.360.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 216.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | | | | 12 Laporan | 160.800.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</i> | - | | | 100 Persentase | 135.790.495,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 190.642.300,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> | | | | 1 Unit | 40.998.195,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 45.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | | | | 2 Unit | 80.642.300,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 80.642.300,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | | | | 81 Unit | 14.150.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 15.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | | | | 1 Unit | 0,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 50.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | | | 647.941.912,00 | | | | | | - | 875.000.000,00 | |
| | | [Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah] | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah | 80 | 80 | 80 | 80 | 647.941.912,00 | - | - | - | - | - | - | 875.000.000,00 | - |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase informasi dan komunikasi publik dipublikasikan</i> | - | | | 100 Persentase | 647.941.912,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 875.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i> | | | | 12 Laporan | 286.063.500,00 | Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 350.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i> | | | | 15 Komunitas | 13.740.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 25.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i> | | | | 20 Permohonan | 163.550.912,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i> | | | | 3 Media | 184.587.500,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | | | 2.133.012.100,00 | | | | | | - | 2.600.000.000,00 | |
| | | [Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika] | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.133.012.100,00 | - | - | - | - | - | - | 2.600.000.000,00 | - |
| | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | | | | | | | | | |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase pengelolaan e-governmnet di lingkup Kab.Pesisir Selatan</i> | - | | | 100 Persentase | 2.133.012.100,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 2.600.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------------|---|-------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | <i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> | | | | 41 Perangkat Daerah | 135.707.416,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE</i> | | | | 5 Aplikasi | 231.420.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 250.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0036 | Penyediaan Akses Internet | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i> | | | | 41 Perangkat Daerah | 1.706.640.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 2.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i> | | | | 2 Dokumen | 59.244.684,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 83.294.110,00 | | | | | | | 175.000.000,00 | |
| 1. | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | | | 83.294.110,00 | | | | | | - | 175.000.000,00 | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|-------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | [Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional] | Indeks Pembangunan Statistik (IPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 83.294.110,00 | - | - | - | - | - | - | 175.000.000,00 | - |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 83.294.110,00 | | | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 175.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0019 | Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i> | | | | 100 % | 32.294.110,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 75.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | - | - | - | - | - | - | 83.294.110,00 | - | - | - | - | - | - | 175.000.000,00 | - |
| | 2.20.02.2.01.0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah</i> | | | | 12 Laporan | 51.000.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 41.550.000,00 | | | | | | | 85.000.000,00 | |
| 1. | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | | | 41.550.000,00 | | | | | | - | 85.000.000,00 | |
| | | [Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah] | Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah | 350 | 388 | 350 | 350 | 41.550.000,00 | - | - | - | - | - | - | 85.000.000,00 | - |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|----------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 41.550.000,00 | | | - | Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | - | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i> | | | | 3 Laporan | 41.550.000,00 | Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | - | | 85.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | J U M L A H | | | | | | | 7.742.712.048,00 | | | | | | | 8.795.375.289,00 | |